

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA
PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR
di BURSA EFEK INDONESIA**

oleh
Galuh Nur Fitri B.S.
0910230074

Dosen Pembimbing
Prof. Dr. Bambang Subroto, SE., MM., Ak.

This study examined the effect of Good Corporate Governance (GCG) to disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR). Board size, frequency of board meetings, board independence, audit committee size, frequency of meetings of the audit committee, the audit committee competence, managerial ownership, institutional ownership, foreign ownership, and the concentrated ownership is a proxy of corporate governance mechanisms. Tests were conducted at 65 public companies in Indonesia Stock Exchange that perform social responsibility disclosure in the Annual Report reporting period in 2011. These results indicate that the mechanisms of good corporate governance which affect the disclosure of Corporate Social Responsibility is concentrated stock ownership factor. As for the other factors such as board size, frequency of board meetings, board independence, audit committee size, frequency of audit committee meetings, audit committee competence, managerial ownership, institutional ownership and foreign ownership are not significantly influence on the CSR disclosure companies in Indonesia. The implications of this research for policymakers warned that should the implementation and reporting obligations of social responsibility by supporting policies are also followed. Another important implication of the need for improvement of the system of corporate governance and reporting in accordance with the implementation of social accountability.

***Keywords:* Corporate Social Responsibility (CSR), Characteristics of Good Corporate Governance (GCG), the Board, Audit Committee, Shareholding Structure.**

PENDAHULUAN

Pada saat ini perusahaan sedang menghadapi tantangan dalam menerapkan standar-standar etis terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab, yang dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR). Ratnasari dan Prastiwi (2010) menyatakan bahwa pada saat ini, tanggung jawab sosial semakin mendapatkan perhatian oleh kalangan dunia usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 74 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang tersebut menyebutkan

bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengungkapan CSR merupakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk dapat memenuhi kepentingan *stakeholders* dan menjamin keberlangsungan perusahaan jangka panjang. CSR dianggap dapat menegaskan *Brand Differentiation* perusahaan, sarana untuk memperoleh *license to operate*, baik dari pemerintah maupun masyarakat, serta sebagai *strategy risk management* perusahaan (Suharto, 2008).

Praktik dan pengungkapan CSR merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep *Good Corporate Governance* (GCG), yang prinsipnya antara lain menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *Stakeholders*-nya, sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerjasama yang aktif dengan *stakeholders* demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Selain itu juga disebutkan bahwa mekanisme dan struktur *governance* di perusahaan dapat dijadikan sebagai infrastruktur pendukung terhadap praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia. Dengan adanya mekanisme dan Struktur *governance* ini diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi. Sehingga apabila asimetri informasi dibiarkan terjadi, maka kemungkinan besar akan terjadi *adverse selection* maupun *moral hazard*, dengan konsekuensi perusahaan tidak melakukan praktik dan pengungkapan CSR (Utama, 2007).

Nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kemakmuran bagi para pemegang saham, sehingga para pemegang saham akan menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut. Nilai perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah melalui tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*. *Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan bagi para pemegang sahamnya (Haruman, 2008).

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) merumuskan tujuan dari *Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). *Corporate Governance* mengandung empat unsur penting, yaitu keadilan, transparansi, pertanggungjawaban dan akuntabilitas, yang mana diharapkan dapat menjadi suatu jalan dalam mengurangi konflik. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik maka akan dinilai dengan baik pula oleh investor.

Secara konkrit prinsip *corporate governance* memiliki beberapa tujuan yaitu memberikan kemudahan informasi mengenai akses investasi domestik maupun asing, mendapat *cost of capital* yang lebih murah, memberikan sebuah keputusan terhadap kinerja ekonomi perusahaan, serta dapat meningkatkan kepercayaan *shareholders* terhadap perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dipengaruhi oleh konflik-konflik yang muncul dalam perusahaan itu sendiri, konflik tersebut muncul karena adanya suatu kepentingan yang berbeda antara agen dan *principal*. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa konflik kepentingan tersebut dapat diminimumkan melalui mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Nuryaman (2008), bahwa struktur kepemilikan merupakan salah satu mekanisme internal untuk mengendalikan masalah agensi pada perusahaan.

Legitimacy theory menyatakan bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sama dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat. *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangan (*financial*) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom line*. Di sini *bottom lines* lainnya selain *financial* juga ada sosial dan lingkungan, karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana reaksi masyarakat sekitar, diberbagai tempat serta waktu yang berbeda akan muncul kepermukaan terhadap perilaku perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya (Kusumadilaga, 2010).

Penelitian Terdahulu telah dilakukan di Indonesia untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari dan Prastiwi (2010). Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ratnasari dan Prastiwi (2010) dengan *setting* di di Indonesia, menggunakan sampel 35 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dengan meneliti beberapa variabel karakteristik *Good Corporate Governance* antara lain adalah ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, proporsi dewan komisaris, ukuran komite audit dan jumlah rapat komite audit. Sedangkan untuk variabel kontrolnya menggunakan ukuran perusahaan, *leverage* dan profitabilitas perusahaan. Penelitian tersebut menemukan bahwa dari semua variabel karakteristik *Good Corporate Governance* tidak ada yang berpengaruh secara signifikan, namun variabel kontrolnya *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan *sustainability report*.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain terdapat pada pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabel komite audit yang sebelumnya hanya mengukur ukuran komite audit dan jumlah rapat komite audit, dalam penelitian ini juga akan ditambahkan dengan kompetensi komite audit. Selain itu juga akan ditambahkan variabel mengenai kepemilikan saham mulai dari kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham asing dan kepemilikan saham terkonsentrasi. Pada variabel komite audit, diukur dengan ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit serta kompetensi komite audit. Hal ini didasarkan pada keputusan Bapepam-LK Nomor Kep-29/PM/2004 nomor IX.1.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Selain itu pada variabel kepemilikan saham diadopsi karena kita tahu pada saat ini Indonesia sudah mulai membuka diri terhadap investor baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh sebab itu kita harus mengkaji seberapa jauh pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya kepemilikan saham tersebut terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap lingkungannya.

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “Apakah karakteristik *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap luas

pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?”. Dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2011.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Menurut Jensen dan Meckling (1976) ada dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham (*shareholders*), dan antara manajer dan pemberi pinjaman (*bondholders*). Masalah keagenan (*agency problem*) sebenarnya muncul ketika *principal* kesulitan untuk memastikan bahwa agen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. *Corporate governance*, merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan yang berkaitan dengan bagaimana para investor memiliki keyakinan bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka serta manajer tidak akan menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana yang telah ditanamkan. Dengan kata lain, *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*). Teori Agensi juga menyatakan bahwa konflik kepentingan antara agen dan *principal* dapat dikurangi dengan mekanisme dan pengawasan yang dapat menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam perusahaan (Ibrahim, 2007). Mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori agensi dapat dilakukan dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

Teori Stakeholder

Setiap *stakeholders* memiliki hak untuk disediakan informasi mengenai pengaruh *stakeholders* terhadap organisasi, sekalipun *stakeholder* memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut ataupun *stakeholder* tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap keberlangsungan organisasi (Deegan, 2000). Ratnasari dan Prastiwi (2010) menyatakan bahwa salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan para *stakeholder*-nya adalah dengan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Dengan pengungkapan ini, diharapkan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan serta dapat menjaga kepercayaan *stakeholders*. Sehingga mendapatkan dukungan dari para *stakeholder* yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

Teori Legitimasi

Menurut Deegan (2000:253), teori legitimasi meyakini suatu gagasan bahwa terdapat ”kontrak sosial” antara organisasi dengan lingkungan dimana organisasi tersebut beroperasi. Konsep ”kontrak sosial” digunakan untuk menunjukkan harapan masyarakat tentang cara yang seharusnya dilakukan organisasi dalam melakukan aktivitas. Harapan masyarakat terhadap perilaku perusahaan dapat bersifat implisit

dan eksplisit. Bentuk eksplisit dari kontrak sosial adalah persyaratan legal, sementara bentuk implisitnya adalah harapan masyarakat yang tidak tercantum dalam peraturan legal. Pengungkapan pelaporan sosial dan lingkungan menjadi salah satu cara perusahaan untuk mewujudkan kinerja yang baik kepada masyarakat dan investor. Dengan pengungkapan tersebut, perusahaan akan mendapatkan *image* dan pengakuan yang baik serta akan memiliki daya tarik dalam penanaman modal atau investor dalam negeri maupun asing.

Good Corporate Governance (GCG)

Corporate governance didefinisikan sebagai suatu sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Struktur *Good Corporate Governance* menetapkan distribusi hak dan kewajiban di antara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu korporasi, seperti dewan direksi, manajer, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (Sutini dan Didin, 2010). Penerapan prinsip-prinsip dalam *Corporate Governance* akan memberikan manfaat: (1) Meminimalkan *agency costs* dengan mengontrol konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara prinsipal dengan agen; (2) Meminimalkan *cost of capital* dengan menciptakan sinyal positif kepada para penyedia modal; (3) Meningkatkan citra perusahaan; (4) Meningkatkan nilai perusahaan yang dapat dilihat dari *cost of capital* yang rendah, dan (5) Peningkatan kinerja keuangan dan persepsi *stakeholders* terhadap masa depan perusahaan yang lebih baik (Utama, 2007). Menurut Murhadi (2009) dalam menciptakan sebuah *Good Corporate Governance*, sebuah perusahaan membutuhkan sebuah mekanisme atau cara yang harus diterapkan dalam perusahaan tersebut, diantaranya Keberadaan Komisaris Independen, Keberadaan Komite Audit, *CEO duality*, *Top Share* dan Koalisi Pemegang Saham

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility pada intinya adalah suatu upaya tanggung jawab perusahaan atau organisasi secara berkelanjutan atas dampak yang ditimbulkan dari keputusan dan aktivitas yang telah diambil dan dilakukan oleh organisasi tersebut, dimana dampak itu pastinya akan dirasakan atau berpengaruh kepada pihak-pihak yang terkait terutama masyarakat dan lingkungan. Pengungkapan kinerja lingkungan, sosial dan ekonomi di dalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibility dan transparansi perusahaan kepada investor dan *stakeholders* lainnya. Menurut Kotler dan Lee (2005) dalam Solihin (2009) menyebutkan bahwa perusahaan akan terdorong untuk melakukan praktik dan pengungkapan CSR, karena memperoleh beberapa manfaat seperti peningkatan penjualan dan *market share*, memperkuat *brand positioning*, meningkatkan citra perusahaan, menurunkan biaya operasi, serta meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor dan analisis keuangan. Standar pengungkapan CSR yang berkembang di Indonesia adalah menunjukkan standar yang dikembangkan oleh GRI (*Global Reporting Initiatives*). Dalam Standart GRI (2006) indikator kinerja dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan hidup dan sosial yang mencakup hak asasi manusia, praktek ketenagakerjaan dan lingkungan kerja,

tanggung jawab produk dan masyarakat. Total indikator kinerja mencapai 79 indikator, terdiri dari 9 indikator ekonomi, 30 indikator lingkungan hidup, 14 indikator praktek tenaga kerja, 9 indikator Hak Asasi Manusia, 8 Indikator kemasyarakatan dan 9 indikator tanggung jawab produk.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan *hypotesis testing* dengan pengujian yang dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian (Sekaran, 2003:124). Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar (*listed*) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan (*annual report*) seluruh perusahaan yang *listed* di BEI periode tahun 2011 yakni sebanyak 460 perusahaan. Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode *judgement sampling*, yaitu salah satu bentuk *purposive sampling* dengan mengambil sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan maksud dan tujuan penelitian dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan publik non keuangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2011.
2. Perusahaan memiliki *website* resmi atau *website* tidak hanya digunakan sebagai alat promosi.
3. Perusahaan menggunakan mata uang Indonesia (rupiah) dalam laporan keuangannya.
4. Perusahaan tidak mengalami defisiensi ekuitas.
5. Perusahaan mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam *Annual Report* yang diterbitkan dalam *website* perusahaan.

Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) pada laporan tahunan perusahaan yang dinyatakan dalam *Corporate Social Responsibility Index* (CSRI) yang akan dinilai dengan membandingkan jumlah pengungkapan yang dilakukan perusahaan dengan jumlah pengungkapan yang disyaratkan dalam GRI meliputi 79 item pengungkapan: *economic, environment, labour practices, human rights, society* dan *product responsibility*. Apabila item informasi yang ditentukan diungkapkan dalam laporan tahunan maka diberi skor 1, dan jika item informasi tidak diungkapkan dalam laporan tahunan maka diberi skor 0. Perhitungan indeks Luas Pengungkapan CSR (CSRI) dirumuskan sebagai berikut :

$$CSRI_t = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{79}$$

Variabel Bebas (Independen)

Variabel independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi variabel yang lain. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah mekanisme *Good Corporate Governance* yang meliputi ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, independensi dewan komisaris, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, kompetensi komite audit, kepemilikan saham manajerial,

kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham asing, dan kepemilikan saham terkonsentrasi.

Dewan komisaris merupakan jabatan tertinggi yang ada dalam suatu perusahaan yang bertugas untuk mengawasi kinerja seluruh organ pada perusahaan tersebut. Ukuran dewan komisaris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan. Dewan Komisaris diklasifikasikan dengan menghitung jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan. Sedangkan untuk frekuensi rapat dewan komisaris dihitung berdasarkan jumlah pertemuan atau rapat internal yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam waktu satu tahun. Kemudian Independensi Dewan Komisaris dinilai berdasarkan proporsi Komisaris Independen dalam suatu Dewan Komisaris perusahaan. Independensi Dewan Komisaris diukur dengan rasio atau presentase (%) antara jumlah anggota Komisaris Independent dibandingkan dengan jumlah total anggota Dewan Komisaris.

Komite audit merupakan departemen yang bertugas untuk membantu pengawasan Dewan Komisaris terhadap perusahaan tersebut. Ukuran Komite Audit merupakan jumlah anggota Komite Audit dalam suatu perusahaan. Ukuran Komite Audit dihitung dengan menghitung jumlah anggota Komite Audit dalam laporan tahunan perusahaan yang tercantum pada laporan tata kelola perusahaan. Untuk Frekuensi Rapat Komite Audit merupakan Jumlah Rapat Komite Audit diukur dengan cara melihat jumlah rapat yang dilakukan Komite Audit pada laporan tahunan perusahaan yang tercantum pada laporan tata kelola perusahaan maupun laporan Komite Audit, baik itu rapat dilakukan secara internal dalam departemen komite audit, rapat komite audit dengan direksi perusahaan serta rapat komite audit dengan dewan komisaris. Sedangkan Kompetensi Komite Audit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kompetensi dalam bidang akuntansi atau keuangan (*financial literacy*). Kompetensi ini harus dimiliki oleh anggota Komite Audit dalam suatu perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Variabel ini diukur dengan cara menghitung jumlah anggota Komite Audit yang mempunyai latar belakang dan keahlian dalam bidang akuntansi dan atau keuangan.

Kepemilikan saham merupakan salah satu hal yang sangat penting dan mampu mempengaruhi pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Kepemilikan saham manajerial adalah tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan manajerial diukur dengan menghitung presentase (%) jumlah lembar saham yang dimiliki pihak manajemen yaitu manajer, komisaris terafiliasi (diluar komisaris independen) dan direksi dibagi dengan total jumlah lembar saham yang beredar. Kemudian untuk Kepemilikan saham institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusional. Investor institusional mencakup bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, perseroan terbatas dan lembaga keuangan lainnya. Kepemilikan institusional dinyatakan dalam presentase (%) yang diukur dengan cara membandingkan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh investor institusional dibanding dengan total jumlah lembar saham yang beredar. Lalu Kepemilikan saham asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing

(luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia. Besarnya saham diukur dari rasio atau presentase (%) jumlah kepemilikan saham yang dimiliki pihak asing terhadap total saham yang beredar. Serta Kepemilikan saham terkonsentrasi merupakan kepemilikan saham yang sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok tertentu. Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi apabila dalam perusahaan terdapat pemegang saham pengendali atau utama. Dimana kepemilikan saham tersebut besarnya lebih dari 50% hak suara pada suatu perusahaan. Kepemilikan saham terkonsentrasi diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yaitu memberi skor 1 untuk perusahaan yang mempunyai kepemilikan terkonsentrasi dan skor 0 untuk perusahaan yang mempunyai kepemilikan saham menyebar.

Variabel Kontrol

variabel kontrol dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yakni ukuran perusahaan (*Firm's size*) dan rasio *Leverage*. Untuk Ukuran perusahaan diukur dari total aset akan ditransformasikan dalam bentuk logaritma dengan tujuan untuk menyamakan dengan variabel lain, karena nilai total aset perusahaan relatif lebih besar dibandingkan dengan variabel-variabel lain dalam penelitian ini. Ukuran perusahaan dirumuskan sebagai berikut:

$$SIZE = \log (\text{nilai buku total aset})$$

Sedangkan untuk *Leverage* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketergantungan perusahaan terhadap hutang dalam membiayai kegiatan operasinya. Hal ini menggambarkan berapa tingkat kelebihan kewenangan yang dimiliki oleh *debtholders* dibandingkan dengan *shareholders*. Rasio *leverage* diukur dengan membagi total utang dengan jumlah ekuitas perusahaan. *Leverage* perusahaan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$LEV = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Equity}} \times 100\%$$

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Prosedur Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
Jumlah perusahaan yang tercatat di BEI tahun 2011	460
Perusahaan sektor keuangan dan asuransi	(84)
Perusahaan tidak memiliki <i>website</i> resmi atau <i>website</i> hanya sebagai alat promosi.	(269)
Perusahaan tidak menggunakan mata uang Indonesia (Rupiah) dalam laporan keuangannya.	(19)
Perusahaan mengalami defisiensi ekuitas	(9)
Perusahaan tidak mengungkapkan CSR dalam <i>annual report</i> -nya	(14)
Total Sampel	65

Sumber : Data Sekunder (diolah)

Statistik Deskriptif					
	N	Minimum	Maksimum	Nilai tengah	Deviasi standar
Ukuran Dewan Komisaris	65	3	11	5,34	1,744
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	65	2	26	7,65	6,099
Proporsi Dewan Komisaris Independen	65	0,20	0,80	0,3835	0,10226
Ukuran Komite Audit	65	3	7	3,37	0,821
Frekuensi Rapat Komite Audit	65	1	52	11,12	12,223
Kompetensi Komite Audit	65	1	5	2,69	0,789
Kepemilikan Saham Manajerial	65	0,00	0,5106	0,016723	0,0693531
Kepemilikan Saham Institusional	65	0	0,87	0,0605	0,15632
Kepemilikan Saham Asing	65	0	0,71	0,1157	0,17186
Kepemilikan Saham Terkonsentrasi	65	0	1	0,77	0,425
Ukuran Perusahaan	65	5,64	8,81	6,7922	0,55004
<i>Leverage</i>	65	0,3500	9,7800	0,844923	1,1355892
Pengungkapan CSR	65	0,51	0,95	0,7626	0,08563
Valid N (listwise)	65				

Pada variabel pengungkapan CSR (CSRI), semakin besar nilai variabel CSRI berarti perusahaan lebih banyak melakukan pengungkapan item CSR. Nilai yang terkecil adalah 0,51 dan nilai yang terbesar adalah 0,95 dengan nilai rata-rata sebesar 0,7626. Hal ini berarti bahwa perusahaan paling sedikit mengungkapkan CSR yang sesuai dengan pedoman GRI sebesar 51% dan paling banyak mengungkapkan sesuai dengan pedoman GRI adalah 95%. Rata-rata pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan adalah 76,26% sesuai dengan pedoman GRI. Standar deviasi sebesar 0,08563 menunjukkan variasi yang terdapat dalam indeks. Besaran indeks menunjukkan besaran pengungkapan tanggung jawab sosial oleh perusahaan. Yakni dari sampel yang digunakan, pengungkapan CSRI yang paling tinggi diungkapkan oleh PT Astra International, Tbk., sedangkan untuk tingkat pengungkapan yang paling rendah dilakukan oleh PT Hero Supermarket Tbk, dan Indosiar Karya Media Tbk.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Koefisien	Sig.	Nilai F	Adjusted R ²
Ukuran dewan komisaris	-1,017	(0,314)	11,536	0,664
Frekuensi rapat dewan komisaris	-0,525	(0,602)		
Independensi dewan komisaris	0,819	(0,417)		
Ukuran komite audit	1,095	(0,297)		
Frekuensi rapat komite audit	-0,030	(0,976)		
Kompetensi komite audit	-0,657	(0,514)		
Kepemilikan saham manajerial	0,595	(0,554)		
Kepemilikan saham institusional	-0,343	(0,733)		
Kepemilikan saham asing	1,045	(0,301)		
Kepemilikan saham terkonsentrasi	4,275	(0,000)*		
Ukuran perusahaan (<i>firm's size</i>)	6,725	(0,000)*		
<i>Leverage</i>	0,182			
	(0,857)			

*signifikan 0,05

Hasil Uji F (F test)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dari hasil pengujian pada tabel diatas dapat dilihat nilai F hitung sebesar 11,536 dan nilai signifikan pada 0,000. Dengan menggunakan tingkat α (alfa) 0,05 atau 5% maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Penolakan H_0 dibuktikan dengan hasil perhitungan bahwa nilai sig (0,000) < dari α (alfa) = 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, independensi dewan komisaris, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, kompetensi komite audit, kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusi, kepemilikan saham asing, kepemilikan saham terkonsentrasi, ukuran perusahaan dan *leverage* secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel pengungkapan CSR.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Berdasarkan diatas dapat diketahui nilai adjusted R² sebesar 0,664. Hal ini berarti 66,4% tingkat pengungkapan CSR dipengaruhi oleh variabel ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, independensi dewan komisaris, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, kompetensi komite audit, kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham asing, kepemilikan saham terkonsentrasi, ukuran perusahaan dan *leverage*. Sedangkan sisanya 33,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Uji Koefisien (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan signifikansi dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan untuk memeriksa lebih lanjut manakah diantara sepuluh variabel independen dan dua variabel kontrol yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Berdasarkan hasil penelitian ini, dari sepuluh variabel independen dan dua variabel kontrol yang dimasukkan dalam model dengan signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan

terkonsentrasi dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap variabel pengungkapan CSR, sedangkan variabel ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, independensi dewan komisaris, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, kompetensi komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan rasio *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yakni pengungkapan CSR.

Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N (Jumlah Sampel)		65
Normal Parameters ^a	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.04474583
Most Extreme Differences	Absolute	0.110
	Positive	0.052
	Negative	-0.110
Kolmogorov-Smirnov Z		0.884
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.415

a. Test distribution is Normal.

Pada hasil uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* dapat dilihat bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* sebesar 0,884. Atau dapat dikatakan tidak signifikan pada 0,05. Hal ini dikarenakan signifikansi ($p=0,415>0,05$). Sehingga dapat dinyatakan bahwa residual berdistribusi normal, sebab nilai signifikansinya lebih besar dari 5%.

b. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Ukuran dewan komisaris	0,862	1,160	Non multikolinearitas
Frekuensi rapat dewan komisaris	0,350	2,861	Non multikolinearitas
Independensi dewan komisaris	0,776	1,289	Non multikolinearitas
Ukuran komite audit	0,373	2,683	Non multikolinearitas
Frekuensi rapat komite audit	0,532	1,880	Non multikolinearitas
Kompetensi komite audit	0,512	1,954	Non multikolinearitas
Kepemilikan saham manajerial	0,857	1,166	Non multikolinearitas
Kepemilikan saham institusional	0,622	1,608	Non multikolinearitas
Kepemilikan saham asing	0,823	1,215	Non multikolinearitas
Kepemilikan saham terkonsentrasi	0,656	1,524	Non multikolinearitas
Ukuran perusahaan (<i>firm's size</i>)	0,655	1,527	Non multikolinearitas

<i>Leverage</i>	0,828	1,207	Non multikolinearitas
-----------------	-------	-------	-----------------------

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2009:25-34). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dengan membandingkan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya Multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* < 0,10 atau nilai VIF > 10. Setelah dilakukan pengujian terhadap model regresi, hasil nilai *Tolerance* dan VIF pada model regresi tidak terdapat adanya gejala multikolinearitas.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Ukuran dewan komisaris	0,841	Non heteroskedastisitas
Frekuensi rapat dewan komisaris	0,955	Non heteroskedastisitas
Independensi dewan komisaris	0,161	Non heteroskedastisitas
Ukuran komite audit	0,149	Non heteroskedastisitas
Frekuensi rapat komite audit	0,961	Non heteroskedastisitas
Kompetensi komite audit	0,189	Non heteroskedastisitas
Kepemilikan saham manajerial	0,385	Non heteroskedastisitas
Kepemilikan saham institusional	0,121	Non heteroskedastisitas
Kepemilikan saham asing	0,145	Non heteroskedastisitas
Kepemilikan saham terkonsentrasi	0,000*	Heteroskedastisitas
Ukuran perusahaan	0,059	Non heteroskedastisitas
Leverage	0,219	Non heteroskedastisitas

*signifikan 0,01

Setelah dilakukan uji *Glejser* terdapat model regresi, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada variabel ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, independensi dewan komisaris, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, kompetensi komite audit, kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusi, kepemilikan saham asing, ukuran perusahaan dan rasio *leverage*. Hal ini ditunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi keseluruhan variabel independen berada diatas tingkat kepercayaan 0,01 atau sebesar 1%. Namun variabel kepemilikan saham terkonsentrasi signifikan pada 0,01 yang mengindikasikan terdapat heteroskedastisitas.

Pembahasan Hipotesis

1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan CSR

Hipotesis pertama (H_1) “Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR” ditolak. Efektivitas mekanisme pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tergantung pada nilai, norma dan kepercayaan yang diterima dalam suatu organisasi (Bayu, 2012). Dengan demikian, untuk mencapai transparansi dan pengungkapan CSR yang lebih luas, maka pembentukan Dewan Komisaris harus memperhatikan komposisi, kemampuan dan integritas anggota, sehingga dapat melakukan fungsi

pengawasan, pengendalian dan mampu memberikan arahan kepada manajemen dengan baik demi kepentingan perusahaan.

2. Pengaruh frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan CSR

Hipotesis kedua (H_2) “Frekuensi Rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR” ditolak. Hal ini terjadi dimungkinkan karena rapat-rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris kurang efektif, dikarenakan adanya dominasi suara dari anggota Dewan Komisaris yang mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya sehingga mengesampingkan kepentingan perusahaan (Muntoro, 2006).

3. Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan CSR

Hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa “Independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR” ditolak. Alasan yang dapat menjelaskan hal ini adalah adanya kemungkinan pemilihan dan pengangkatan Komisaris Independen yang kurang efektif (FCGI, 2002). Hal ini merupakan isu atau hal yang penting, bahwa banyak anggota dewan komisaris tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat menunjukkan independensinya atau sebenarnya tidak independen (*not truly independent*), sehingga fungsi pengawasan tidak dapat berjalan dengan baik (Vethanayagam et. al., 2006 dalam Hashim dan Devi, 2007). Dengan demikian, keberadaan atau proporsi komisaris independen tidak dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai pengungkapan CSR.

4. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap pengungkapan CSR

Hipotesis keempat (H_4) yang diajukan “Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR” ditolak. Alasan yang dapat digunakan untuk menjelaskan hal ini adalah berdasarkan tabel statistik deskriptif, dari data yang telah diolah diketahui bahwa rata-rata ukuran komite audit perusahaan adalah 3 orang, yang artinya bahwa sebagian besar perusahaan memiliki jumlah komite audit yang sama yaitu 3 (tiga) orang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ukuran komite audit akan menjadi tidak berpengaruh terhadap mekanisme pengawasan dan pengungkapan CSR karena dimungkinkan jumlah anggota komite audit tersebut hanya sebagai formalitas untuk memenuhi peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, tanpa mempertimbangkan efektifitas dan kompleksitas perusahaan.

5. Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Pengungkapan CSR

Hipotesis kelima (H_5) yang menyebutkan bahwa “Frekuensi Rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR” ditolak. Alasan yang dapat menjelaskan hal ini dimungkinkan adanya faktor kompetensi Komite Audit yang diteliti juga dalam penelitian ini, menemukan hasil bahwa kompetensi yang dimiliki oleh komite audit kurang memadai sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya secara efektif. Sebab untuk menjadikan fungsi komite audit yang efektif tidak hanya memperhatikan ukuran, frekuensi rapat, tetapi juga kualitas dan kompetensi anggota komite audit.

6. Pengaruh Kompetensi Komite Audit terhadap pengungkapan CSR

Hipotesis keenam (H_6) “Kompetensi Komite Audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR” ditolak. Hal ini dapat dijelaskan karena fungsi

komite audit tidak hanya bertanggung jawab dalam pengawasan pelaporan keuangan, namun juga termasuk pengawasan pelaksanaan GCG dan pengendalian internal perusahaan. Dengan demikian, keahlian dan kompetensi komite audit dibidang keuangan dan akuntansi (*Financial literacy*) saja tidak cukup untuk menjamin dan membantu pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris. Oleh karena itu, agar mekanisme pengawasan berjalan dengan baik, maka komite audit juga tidak hanya harus kompeten dalam bidang akuntansi atau keuangan saja, namun harus kompeten juga pada keahlian dan pemahaman lain dibidang hukum, peraturan pasar modal, serta proses bisnis terkait (Alijoyo, 2003).

7. Pengaruh Kepemilikan Saham Manajerial Terhadap Pengungkapan CSR

Hipotesis ketujuh (H_7) yang menyebutkan bahwa “Kepemilikan Saham Manajerial berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR” ditolak. Dengan kepemilikan manajerial yang relatif sangat kecil, maka masih terjadi konflik kepentingan antara pemilik dengan manajer, dimana kepentingan pribadi manajer belum dapat diselaraskan dengan kepentingan perusahaan oleh pemilik. Dengan demikian kepemilikan manajerial yang relatif sangat kecil, akan mendorong tindakan manajer untuk berusaha memaksimalkan nilai perusahaan yang selaras dengan kepentingan pemilik. Sehingga pengungkapan CSR masih belum dapat dilakukan secara maksimal.

8. Pengaruh Kepemilikan Saham Institusional terhadap pengungkapan CSR

Hipotesis kedelapan (H_8) yang menyatakan “Kepemilikan Saham Institusional berpengaruh Positif terhadap luas pengungkapan CSR” ditolak. Hasil penelitian menemukan hubungan negatif antara kepemilikan saham institusional dengan pengungkapan CSR. Hal ini dikarenakan semakin banyak saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi, maka institusi mempunyai kemampuan untuk melakukan intervensi terhadap jalannya perusahaan dan mengatur proses menyusun laporan keuangan. Akibatnya manajer terpaksa melakukan tindakan tertentu demi untuk memenuhi keinginan pihak-pihak tertentu, diantaranya pemilik (Boediono, 2005). Dengan demikian, apabila kepemilikan saham institusional dalam perusahaan jumlahnya semakin besar, maka hanya akan memaksimalkan keuntungan pribadi, tanpa memperdulikan tanggung Jawabnya kepada *stakeholders* lain.

9. Pengaruh Kepemilikan Saham Asing Terhadap Pengungkapan CSR

Hipotesis kesembilan (H_9) “Kepemilikan Saham Asing berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR” ditolak. Alasan yang dapat digunakan untuk menjelaskan hal tersebut adalah bahwa kemungkinan kepemilikan asing pada perusahaan di Indonesia secara umum belum memperdulikan masalah lingkungan sosial sebagai isu kritis yang harus secara efektif untuk diungkapkan dalam laporan tahunan (Machmud dan Djakman, 2008). Alasan lain dimungkinkan jika kepemilikan saham asing dikonsolidasikan dengan perusahaan induk di negara asal maka kemungkinan presentase kepemilikan tersebut sangat kecil, sehingga mereka menjadi kurang memperhatikan pengungkapan CSR sebagai suatu hal yang penting untuk diungkapkan kepada publik.

10. Pengaruh Kepemilikan Saham Terkonsentrasi terhadap Pengungkapan CSR

Hipotesis kesepuluh (H_{10}) “Kepemilikan Saham Terkonsentrasi berpengaruh Positif terhadap luas pengungkapan CSR” diterima. Kepemilikan saham terkonsentrasi dapat mengurangi masalah konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen. Hal ini berarti kepemilikan saham terkonsentrasi menjadi mekanisme internal pendisiplinan manajemen, sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas monitoring, karena dengan kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang cukup signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki manajemen sehingga dapat mengurangi masalah agensi dan hal ini dapat mendorong pengungkapan CSR secara lebih luas.

11. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap pengungkapan CSR

Dalam kerangka teori agensi, apabila ukuran perusahaan lebih besar, maka biaya keagenan yang dikeluarkan juga lebih besar. Guna mengurangi biaya keagenan tersebut, perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas. Disamping itu perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti. Sehingga pengungkapan yang lebih besar merupakan cara untuk mengurangi biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005). Secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan. Perusahaan yang lebih besar mempunyai aktivitas operasi yang lebih banyak dan memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat. Selain itu, kemungkinan besar jumlah pemegang sahamnya yang lebih banyak akan selalu memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan. Sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas.

12. Pengaruh Rasio *Leverage* Perusahaan terhadap Pengungkapan CSR

Besar kecilnya rasio *leverage* suatu perusahaan tidak mempengaruhi luas pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan. Hal ini diduga sudah terjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan *debtholders*, yang mengakibatkan *debtholders* tidak terlalu memperhatikan rasio *leverage* perusahaan.

Hasil Uji Hipotesis

		HIPOTESIS
H ₁	Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR.	Ditolak
H ₂	Frekuensi rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR.	Ditolak
H ₃	Independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR.	Ditolak
H ₄	Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR.	Ditolak
H ₅	Frekuensi rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR.	Ditolak
H ₆	Kompetensi Komite Audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR.	Ditolak
H ₇	Kepemilikan saham manajerial berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR.	Ditolak

H ₈	Kepemilikan Saham Institusional berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR.	Ditolak
H ₉	Kepemilikan saham asing berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR.	Ditolak
H ₁₀	Kepemilikan saham terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR.	Diterima

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan yang ada di Indonesia khususnya yang *listed* di BEI periode tahun 2011 dipengaruhi oleh mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG), yakni kepemilikan saham terkonsentrasi. Hal ini dikarenakan struktur kepemilikan saham terkonsentrasi dapat digunakan sebagai cara yang efektif untuk menurunkan biaya agensi dan melakukan proses monitoring. Kemudian dalam teori agensi juga disebutkan apabila ukuran perusahaan lebih besar, maka biaya keagenan yang dikeluarkan lebih besar. Guna mengurangi biaya keagenan tersebut, perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas. Oleh sebab itu pengungkapan yang lebih besar merupakan cara untuk mengurangi biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005). Sedangkan untuk mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) yang sebelumnya di indikasikan mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* namun dalam penelitian ini tidak terbukti diantaranya ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, independensi dewan komisaris, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, kompetensi komite audit, kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional, dan kepemilikan saham asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Alijoyo, F. Antonius. 2003. *Seninar Nasional GCG. Keberadaan dan Peran Komite Audit dalam Rangka Implementasi GCG*. Surabaya.
- Bayu, Bimo Aji. 2012. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang: Semarang.
- Boediono, Gideon SB. 2005. *Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba Dengan Menggunakan Analisis Jalur*. Simposium Nasional Akuntansi 8. Solo.
- Deegan, Craig. 2000. *Financial Accounting Theory*. McGraw-Hill Australia Pty Limited. Australia
- FCGI. 2001. *Corporate Governance*. (<http://www.fcgi.or.id>. Diakses tanggal 10 Oktober 2012)
- Ghozali, imam. 2009. *SPSS. Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penelitian UNDIP. Semarang.
- Global Reporting Initiatives (GRI). 2006. *Sustainability Reporting Guidelines*. Amsterdam.

- Haruman, Tendi. 2008. *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Keputusan Keuangan dan Nilai Perusahaan*. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Widyatama. Bandung.
- Hashim, Hafiza Aishah dan Devi, S. Susela. 2007. *Corporate Governance, Ownership Structure and Earnings Quality: Malaysian Evidence*. Universiti Malaya.
- Ibrahim, Majid. 2007. *Pengaruh Struktur Internal Governance terhadap Earning Manajemen*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Jansen, Michael C. Dan W.H. Meckling. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Constand Ownership Structure*. Juournal of Financial Economics 3.Hal 305-360.
- Kusumadilaga, Rimba. 2010. *Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating (studi empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Machmud, Novita dan Chaerul D. Cjakman. 2008. *Pengaruh Struktur Kpemilikan Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR Disclosure) Pada Laporan Tahunan Perusahaan : Studi Empiris Pada Perusahaan Publik yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006*. Simposium Nasional Akuntansi 11. Pontianak.
- Muntoro, Ronny Kusuma. 2006. *Makalah Membangun Dewan Komisaris Yang Efektif*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Murhadi, Werner R. 2009. *Studi Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Praktik Earning Management pada Perusahaan Terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.11, No.1 Maret 2009 : 1-10. Surabaya.
- Nuryaman. 2008. *Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Manajemen Laba*. Simposium Nasional Akuntansi 11. Pontianak.
- Ratnasari, Yunita dan Andri Prastiwi, S.E., M.Si., Akt. 2010. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Dalam Sustainable Report*. Thesis Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods For Business: A Skill Building Aproach* John Wiley and Sons, Inc. New York-USA.
- Sembiring, Eddy Rismanda. 2005. *Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris Pada Perusahaan yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia*. SNA VIII Solo, 15-16 September 2005. Solo.
- Suharto, E. 2008. *Menggagas Standart Audit Program CSR*. <http://www.google.com> Januari 2013.
- Solihin, Ismail. 2009. *Corporate social responsibility from charity to sustainability*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sutini dan Didim Mukodim. 2010. *The Effect Implementation of Good Corporate Governance on Earning Managemen in Mining Company on The Indonesia Stock Exchange*. Undergraduate program Gunadarma Universitas.

- Utama, Sidharta. 2007. "Evaluasi infrastruktur pendukung pelaporan tanggung jawab sosial dan Lingkungan di Indonesia". *Pidato Ilmiah pengukuhan guru besar FEUI*. Jakarta.
- _____, *Bapepam-LK Nomor Kep-29/PM/2004 nomor IX.1.5 tentang pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*. 2004. Jakarta.
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. 2008. Jakarta.